



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-192/PB.7/2024

2 September 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Perpanjangan Periode Pendaftaran Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024

- Yth. 1. Para Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir)
2. Para Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan seleksi perpindahan jabatan sebagaimana hal pokok surat yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Unit Penyelenggara berdasarkan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor PENG-13/PB.7/2024, pendaftaran seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional APK APBN dan Jabatan Fungsional PK APBN Tahun 2024 diperpanjang sebagaimana tabel berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan (Semula) | Waktu Pelaksanaan (Menjadi) |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pembuatan user e-Jafung calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh Admin Satker e-Jafung | 24 Agustus s.d. 2 September 2024 | 24 Agustus s.d. 7 September 2024 |
| 2 | Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi e-Jafung | | |
| 3 | Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja (role user Admin Satker) dan pengajuan usulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (role user Admin K/L) melalui aplikasi eJafung | | |
| 4 | Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (role user Admin K/L) dan Pengajuan usulan kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi melalui aplikasi e-Jafung. | | |
| 5 | Penyampaian dokumen – dokumen sebagai berikut dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Unit Penyelenggara. - Surat usulan nama calon peserta uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain; | 4 September 2024 | 9 September 2024 |

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan (Semula) | Waktu Pelaksanaan (Menjadi) |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta; - Surat persetujuan usulan kebutuhan jabatan fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. | | |
| 5 | Pelaksanaan E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Fungsional pada klc2.kemenkeu.go.id | 23 Agustus s.d. 13 September 2024 | 23 Agustus s.d. 14 September 2024 |
| 6 | Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi | 3 s.d. 17 September 2024 | 8 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Masa Sanggah | 18 s.d. 19 September 2024 | 21 s.d. 22 September 2024 |

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Sulaimansyah

Tembusan:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN

Surat Direktur Sistem Perbendaharaan

Nomor : S-192/PB.7/2024

Tanggal : 2 September 2024

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Ketenagakerjaan
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
22. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
23. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
27. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
31. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
32. Badan Intelijen Negara
33. Badan Siber Dan Sandi Negara
34. Dewan Ketahanan Nasional
35. Badan Pusat Statistik
36. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
37. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN
38. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
39. Kementerian Komunikasi Dan Informatika
40. Kepolisian Negara Republik Indonesia
41. Badan Pengawas Obat Dan Makanan

42. Lembaga Ketahanan Nasional
43. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
44. Badan Narkotika Nasional (BNN)
45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
46. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
47. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
48. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
49. Komisi Pemilihan Umum
50. Mahkamah Konstitusi RI
51. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
52. Badan Informasi Geospasial (BIG)
53. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
54. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
55. Lembaga Administrasi Negara
56. Arsip Nasional Republik Indonesia
57. Badan Kepegawaian Negara
58. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Pemuda Dan Olahraga
61. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
62. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
63. Komisi Yudisial Republik Indonesia
64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
65. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
66. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
67. Badan SAR Nasional
68. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
69. Ombudsman Republik Indonesia
70. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
71. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
72. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
73. Sekretariat Kabinet
74. Badan Pengawas Pemilihan Umum
75. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76. Televisi Republik Indonesia
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)
78. Badan Keamanan Laut
79. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
80. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
81. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
82. Badan Riset Dan Inovasi Nasional
83. Badan Pangan Nasional
84. Otorita Ibu Kota Nusantara
85. Badan Karantina Indonesia

LAMPIRAN

Surat Direktur Sistem Perbendaharaan

Nomor : S-192/PB.7/2024

Tanggal : 2 September 2024

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Ketenagakerjaan
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
22. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
23. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
27. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
31. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
32. Badan Intelijen Negara
33. Badan Siber Dan Sandi Negara
34. Dewan Ketahanan Nasional
35. Badan Pusat Statistik
36. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
37. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN
38. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
39. Kementerian Komunikasi Dan Informatika
40. Kepolisian Negara Republik Indonesia
41. Badan Pengawas Obat Dan Makanan
42. Lembaga Ketahanan Nasional
43. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
44. Badan Narkotika Nasional (BNN)
45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi



46. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
47. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
48. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
49. Komisi Pemilihan Umum
50. Mahkamah Konstitusi RI
51. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
52. Badan Informasi Geospasial (BIG)
53. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
54. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
55. Lembaga Administrasi Negara
56. Arsip Nasional Republik Indonesia
57. Badan Kepegawaian Negara
58. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Pemuda Dan Olahraga
61. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
62. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
63. Komisi Yudisial Republik Indonesia
64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
65. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
66. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
67. Badan SAR Nasional
68. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
69. Ombudsman Republik Indonesia
70. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
71. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
72. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
73. Sekretariat Kabinet
74. Badan Pengawas Pemilihan Umum
75. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76. Televisi Republik Indonesia
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)
78. Badan Keamanan Laut
79. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
80. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
81. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
82. Badan Riset Dan Inovasi Nasional
83. Badan Pangan Nasional
84. Otorita Ibu Kota Nusantara
85. Badan Karantina Indonesia